

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Ahmad Zaenal Fanani, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktik)*.  
(Bandung: Mandar Maju, 2014).

Alex T. Tobing dan Bambang Setiawan, *Pengadilan Perikanan Suatu Upaya  
Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

Amiek Soemarmi, *Buku Ajar Hukum Perikanan*. (Semarang: Penerbit Universitas  
Diponegoro (UNDIP Press), 2016).

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang  
Pengadilan Perikanan*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Depkupham, 2009).

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana,  
2013).

Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan  
dalam UUD 1945*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).

Magdalena, dkk., *Metode Penelitian Untuk Penulisan Laporan Penelitian dalam  
Ilmu Pendidikan Agama Islam* (Bengkulu: Literasiologi, 2021).

Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka  
Utama, 2013).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

Victor P.H. Nikijuluw, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal*. (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2008).

### **Jurnal dan Artikel:**

Abdi Afriando, “Kajian Hukum Dualisme Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Setelah Ditetapkan-nya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 7, no. 2, (2020).

Ade Hari Siswanto, “Peran Pengadilan Perikanan dalam Illegal Fishing oleh Kapal Asing di Wilayah Kedaulatan Laut Indonesia,” *Jurnal Forum Ilmiah* 16, no. 1 (2019).

Ade Nur Anugrah dan Arindra Alfarizi, “Literature Review Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Indonesia,” *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)* 3, no. 2 (2021).

Afria Sagita dan Yosua Hamonangan Sihombing, “Optimalisasi Hukum Laut Nasional untuk Pengembangan Potensi Sumber Daya Perikanan di Indonesia *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2, (2017).

Ahmad Syaifudin Anwar, “Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi,” *Jurnal Hukum Kenegaraan Politik Islam* 2, no. 2, (2022).

Ahmad, “Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial: Independensi Hakim Bukan Sebagai Hak Melainkan Kewajiban,” *Prosiding: Sinergitas Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court* (2017).

Ardyansyah Jintang, “Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman di Indonesia untuk Mewujudkan Independence of Judiciary secara Paripurna,” *Jurnal Hukum Peratun* 6, no. 2 (2023).

Dachran Bustami, “Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2017).

Fahmiron, “Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman,” *Jurnal Litigasi* 17, no. 2, (2016).

Fahrul Azmi Lubis, dkk., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Belawan),” *Jurnal IURIS STUDIA: Kajian Hukum* 6, no. 1 (2025).

Hana Maria Wijayanto, “Peradilan Khusus dalam Sistem Peradilan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022).

I Putu Dede Karyadi dan Putu Sekarwangi Saraswati, “Peranan Diskresi Hakim dalam Kewenangan Mengadili,” *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2, no. 1, (2022).

- Ihat Subihat, "Sistem Peradilan di Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Yustitia* 5, no. 1 (2019).
- Khopiatuziadah, "Evaluasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perikanan Dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Perikanan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1, (2017).
- Lucky Endrawati, "Rekonstruksi Analogi dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif," *Jurnal Hermeneutika* 2, no. 1, (2018).
- M. Farhan Akmal dan Bunga Natasyah, "Lembaga-Lembaga Negara," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 10, no. 5 (2025).
- Rasji, dkk., "Potensi Singgungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2, (2024).
- Reni Putri Anggraeni, dkk., "Gagasan Pengadilan Maritim dalam Tata Hukum Indonesia: Integrasi Pengadilan Perikanan dan Mahkamah Pelayaran sebagai Pembaharuan Hukum," *Jurnal RECHTSVINDING: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 3 (2023).
- Selma Dwi Amalia, dkk., "Problematika Hukum Pagar Laut yang Berdampak pada Mata Pencaharian Nelayan di Tangerang, Banten," *Forschungforum Law Journal*, no. 2, (2025).

- Simon Petrus Tanggoi, “Peran Hakim Ad Hoc Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke dalam Menyusun Putusan,” *Animha Law Journal 1*, no. 2 (2024).
- Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier” *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning and Studies (IICLS) 5*, no. 3 (2024).
- Uni Sabandina, “Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis dan Normatif,” *Journal Desiderata: Law review 2*, no. 1, (2025).
- Vincentius Patria Setyawan, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Fundamental 14*, no. 1, (2025).
- Wahyu Febrianto, “Penjatuhan Pidana Dalam Peradilan In Absentia Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Putusan Nomor:210/Pids.Sus/2011/Pn.Sbs),” *Jurnal LEX Certa 1*, no.1, (2015).
- Welly Angela Riry, “Kedudukan Pengadilan Perikanan dalam Mekanisme Penegakan Hukum Perikanan Indonesia,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 8*, no. 5 (2023).
- Yulita Dwi Pratiwi, dkk., “Politik Hukum Penetapan Wilayah Pengelolaan Perikanan dan Penangkapan Ikan Terukur dalam Pembangunan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan,” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan 6*, no. 3 (2022).

Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Hukum," *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2016).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

*United Nations on The Law of The Sea 1982.*

Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul.

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 195/Pid.B/LH/2020/PN Jap.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Dan Pengadilan Negeri Ranai.



*Indonesia (BNPP RI) (2023):* <https://bnpp.go.id/berita/akhiri-kerumitan-data-kewilayahan-indonesia-siap-menuju-poros-maritim-dunia> Diakses pada tanggal 26 Januari 2026.

Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia, “Produksi Perikanan Tangkap,” *kkp.go.id* (2024): <https://portaldata.kkp.go.id/portals/data-statistik/prod-ikan/summary> Diakses pada 26 Januari 2026.

Khamozaru Waruwu, “Hakim Sebagai Penegak Etika Profesi Hukum ; Suatu Kajian Tentang Kegagalan dan Kecemasan Dibalik Kewibawaan Toga Seorang Hakim,” *MARInews* (2025): <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hakim-sebagai-penegak-etika-profesi-hukum-suatu-kajian-0Cd> Diakses pada 26 Januari 2026.

Peppy Nofriandi, “79 Peserta Calon Hakim Ad Hoc Perikanan Tahun 2022 Mengikuti Seleksi Ujian Tertulis,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia* (2022): <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5200/79-peserta-calon-hakim-ad-hoc-pengadilan-perikanan-tahun-2022-mengikuti-seleksi-ujian-tertulis> Diakses pada 26 Januari 2026.